

Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Tingkat Pengangguran di Regional Eks Karesidenan Banyumas Periode 2016-2024

Muhamad Faiz Arrafi

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Email: arrafifaiz657@gmail.com

Abstrak

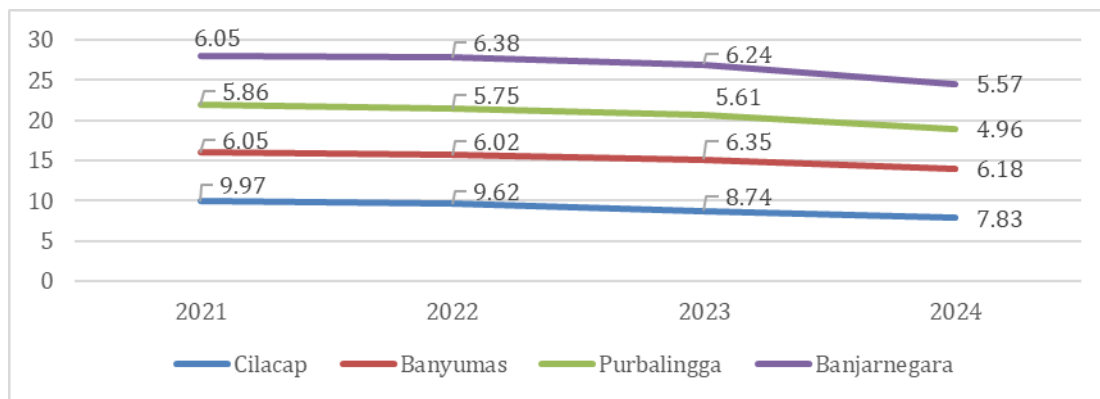
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Eks Karesidenan Banyumas selama periode 2016-2024. Melalui analisis regresi data panel dan serangkaian uji seperti Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier, Random Effect Model (REM) terpilih sebagai model terbaik untuk estimasi. Analisis regresi menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran ($\text{Prob. } 0,0000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menurunkan pengangguran. Sebaliknya, PDRB dan UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, dengan nilai $\text{Prob. masing-masing } 0,0000 < 0,05$ dan $0,0158 < 0,05$. Pengaruh positif PDRB mengindikasikan adanya "jobless growth" atau ketidaksesuaian keterampilan, sedangkan pengaruh positif UMK menunjukkan potensi beban biaya tenaga kerja yang dapat menghambat penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, Upah Minimum Kabupaten, Data Panel, Banyumas

PENDAHULUAN

Pengangguran menjadi isu ekonomi makro yang kompleks dan berdampak luas di Indonesia. Ketidakeimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Dampaknya sangat signifikan, termasuk penurunan pendapatan per kapita yang drastis dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Selain itu, pengangguran juga dapat memicu kemiskinan, kesenjangan sosial, dan potensi ketidakstabilan ekonomi dan sosial (Hasibuan, 2023). Pengangguran yang tinggi mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya manusia, yang berdampak pada terhambatnya pencapaian kesejahteraan masyarakat secara komprehensif (Saragih, Silalahi and Tambunan, 2022).

Pemerintah Indonesia memprioritaskan penanggulangan pengangguran melalui berbagai kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, namun tantangan pengangguran tetap menjadi isu penting, terutama di tingkat regional. Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang besar memiliki dinamika ketenagakerjaan yang kompleks khususnya wilayah Banyumas Raya meliputi Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, dan Purbalingga. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat keragaman ekonomi dan sosial, wilayah eks karesidenan Banyumas menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi angkatan kerja. Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, dan Purbalingga mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkannya (BPS, 2023). Gambar 1.0 menunjukkan pola tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tidak stabil di wilayah eks karesidenan Banyumas. Hal ini menandakan adanya faktor-faktor kompleks yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja dan stabilitas ketenagakerjaan di tingkat lokal.

**Gambar 1.0****Tingkat Pengangguran di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas 2021-2024**

Sumber: BPS 2025 (data diolah)

Data tingkat pengangguran di wilayah Eks Karesidenan Banyumas menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024. Kabupaten Cilacap mengalami penurunan dari 9,97% menjadi 7,83%, Banyumas dari 6,05% menjadi 6,18% setelah sempat fluktuatif, Purbalingga menunjukkan penurunan stabil dari 5,86% menjadi 4,96%, dan Banjarnegara mempertahankan tingkat pengangguran terendah dengan penurunan dari 6,05% menjadi 5,57%. Disparitas regional yang terlihat dalam data ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan kebijakan ketenagakerjaan yang disesuaikan untuk setiap kabupaten guna terus mendorong penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Eks Karesidenan Banyumas.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sebagai indikator penting kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Dengan meningkatkan IPM melalui perbaikan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran dengan meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja di pasar kerja (Triatmanto and Bawono, 2023). Penelitian Suparman & Muzakir, (2023) dan Sanitra, (2021) menunjukan bahwa IPM memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat pengangguran.

Selain IPM, stabilitas ekonomi makro juga berperan penting dalam mengurangi pengangguran. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi, sehingga menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja (Pham and Sala, 2022; Popescu and Diaconu, 2022). Penelitian oleh Ruchba and Hadiyan, (2019) menunjukan bahwa dalam jangka pendek inflasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Namun, Penelitian oleh (Suharti, Naufal and Paiman, 2021a) bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Dengan kata lain, naik turunnya inflasi tidak secara langsung mempengaruhi kenaikan dan penurunan jumlah pengangguran.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kebijakan upah. Analisis dampak kebijakan upah minimum terhadap pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa implementasi UMK dapat memiliki konsekuensi yang kompleks. Di satu sisi, UMK dapat meningkatkan standar hidup pekerja. Namun di sisi lain, kenaikan UMK yang tidak terkendali dapat meningkatkan biaya tenaga kerja perusahaan, sehingga mengurangi kemampuan perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru atau mempertahankan karyawan yang ada dan berdampak memperburuk kondisi (Pratomo, 2016; Feriyanto, El Aiyubbi and Nurdany, 2020). Penelitian (Siregar, 2020) menunjukan bahwa kenaikan upah minimum menurunkan lapangan kerja di sektor formal dan sektor informal.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama aktivitas ekonomi di suatu wilayah, mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan. Analisis PDRB sebagai indikator utama aktivitas ekonomi regional menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB yang tinggi dapat berkorelasi positif dengan peningkatan kapasitas produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu wilayah (Tjahjanto et al., 2023; Purwanti, 2024). Penelitian oleh Tjahjanto et al., (2023) dan Hjazeen et al., (2021) menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan efek negatif dan signifikan

terhadap pengangguran. Namun, penelitian Leasiwal et al., (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Mengingat kompleksitas permasalahan pengangguran dan peran penting IPM, inflasi, UMK, dan PDRB dalam dinamika ekonomi regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tingkat pengangguran di empat kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Banyumas, yaitu Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, dan Purbalingga. Dengan mempertimbangkan kedekatan geografis dan potensi interaksi ekonomi antar kabupaten, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi pengangguran dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

METODE PENELITIAN

Analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi linier data panel. Data panel adalah data gabungan antara data *cross section* dengan data *times series*. Data *cross section* penelitian menggunakan 4 kabupaten yaitu kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara. Sedangkan data *time series* penelitian ini menggunakan data penelitian periode tahun 2016-2024. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu tingkat pengangguran dan variabel independen yaitu Upah Minimum Kabupaten (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Analisis data regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews 13. Adapun persamaan model data panel yang digunakan pada penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X1_{it} + \beta_2 \text{Log}X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + e_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); $\text{Log}X1_{it}$ = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB);

$\text{Log}X2_{it}$ = Upah Minimum Kabupaten (UMK); $X3_{it}$ = Indeks Pembangunan Manusia

(IPM); $X4_{it}$ = Inflasi; e_{it} = Residual/Error

Penelitian ini menggunakan tiga model regresi data panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model terbaik di antara ketiga model tersebut, dilakukan melalui serangkaian uji, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM).

HASIL PENELITIAN

Tahap awal analisis pada penelitian ini yaitu dengan melakukan estimasi menggunakan Uji Chow untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, Uji Chow dilakukan untuk memilih model yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh. Adapun hasil Uji Chow adalah:

Tabel 1.0 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Period F	5.109890	(8,23)	0.0010
Period Chi-square	36.77393	8	0.0000

Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.0010 dan Chi-square sebesar 0.0000. Kedua nilai ini secara signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha=0.05$. Temuan ini mengindikasikan penolakan hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan karakteristik

antar individu (kabupaten). Dengan demikian, *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model terbaik dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM). Kemudian dilanjutkan dengan Uji Hausman guna memilih model yang terbaik antara FEM dengan REM. Adapun hasil Uji Hausman adalah :

Tabel 2.0 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	5.658780	4	0.2261

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas Chi-square sebesar $0.2261 > 0.05$. Berdasarkan kriteria ini, hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan sistematis antara estimator FEM dan REM tidak dapat ditolak. Oleh karena itu, *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terbaik dibandingkan FEM. Kemudian dilanjutkan dengan Uji *Lagrange Multiplier* guna memilih model yang terbaik antara CEM dengan REM. Adapun hasil Uji Lagrange Multiplier adalah:

Tabel 3.0 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	1.241933 (0.2651)	13.23219 (0.0003)	14.47412 (0.0001)

Uji Lagrange Multiplier menunjukan bahwa nilai probabilitas Breusch-Pagan untuk Period ($0.0003 < 0.05$) dan Both ($0.0001 < 0.05$) menunjukkan adanya efek random yang signifikan. Berdasarkan hasil komprehensif dari ketiga uji, *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model estimasi terbaik. Adapun hasil Hasil Regresi Random Effect Model adalah:

Tabel 4.0 Hasil Regresi Random Effect Model (REM)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t. Statistik	Prob.
C	-48.61224	16.81061	-2.891760	0.0069
Log(PDRB)	2.013405	0.229263	8.782085	0.0000
IPM	-0.415796	0.072302	-5.750783	0.0000
INF	-0.032844	0.144708	-0.226970	0.8219
Log(UMK)	3.362143	1.136383	2.554077	0.0158
R-Squared	0.791819	F-statistic		29.47726
Adjusted R-squared	0.764957	Prob(F-statistic)		0.000000

Analisis regresi menggunakan Random Effect Model (REM) menghasilkan temuan sebagai berikut:

- Koefisien Konstanta: Hasil analisis menunjukkan konstanta sebesar -48,61224 yang signifikan secara statistik ($p = 0,0069 < 0,05$), mengindikasikan bahwa TPT diperkirakan sebesar -48,61224 ketika seluruh variabel independen tidak berpengaruh.
- Variabel PDRB: hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan koefisien sebesar 2,013405 dan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Artinya, setiap peningkatan PDRB sebesar 1% akan meningkatkan TPT sebesar 2,013405%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
- Variabel IPM: hasil analisis menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan koefisien sebesar -0,415796 dan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Artinya, setiap peningkatan satu unit IPM akan menurunkan TPT sebesar 0,415796%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

- d. Variabel Inflasi: hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan koefisien sebesar $-0,032844$ dan probabilitas $0,8219 > 0,05$.
- e. Variabel UMK: hasil analisis menunjukkan bahwa UMK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan koefisien sebesar $3,362143$ dan probabilitas $0,0158 < 0,05$. Artinya, setiap peningkatan UMK sebesar 1% akan meningkatkan TPT sebesar 3,362143%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
- f. R-Squared: Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi memiliki kekuatan penjelasan yang tinggi dalam memprediksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan nilai R-squared sebesar 0,791819. Artinya, sekitar 79,18% variasi dalam TPT dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel-variabel independen (PDRB, IPM, Inflasi, dan UMK)

F-Statistik: hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik secara keseluruhan, dengan nilai F-statistic sebesar 29,47726 dan probabilitas $0,000000 < 0,05$. Artinya, variabel-variabel independen dalam model secara kolektif memiliki kemampuan yang signifikan terhadap TPT di wilayah Eks Karesidenan Banyumas.

PEMBAHASAN

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Terhadap Pengangguran

Temuan penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap pengangguran. Secara teori hasil temuan ini kontradiktif dengan Hukum Okun dalam teori ekonomi klasik. Hukum Okun menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat seharusnya diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran (Prachowny, 1993). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Leasiwal et al., 2022) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pertumbuhan PDRB mungkin tidak selalu diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, sebuah fenomena yang dikenal sebagai pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja (*jobless growth*). Hal ini terjadi jika pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor-sektor yang padat modal (*capital-intensive*) dan kurang menyerap tenaga kerja (*labor-intensive*), atau jika terjadi peningkatan otomatisasi dan efisiensi produksi yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Akibatnya, meskipun output ekonomi meningkat, tingkat pengangguran tetap tinggi atau bahkan meningkat. Konsep *jobless growth* ini telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi pembangunan (Hasibuan, 2023).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat menciptakan jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan spesifik yang tidak dimiliki oleh mayoritas angkatan kerja di wilayah Eks Karesidenan Banyumas, menyebabkan ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*). Meskipun ada permintaan tenaga kerja, pasokan tenaga kerja yang ada tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga terjadi pengangguran struktural. Investasi yang masuk mungkin tidak sejalan dengan profil keterampilan angkatan kerja lokal, sehingga hal itu dapat memperburuk masalah pengangguran (Tjahjanto et al., 2023)

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran

Temuan penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengangguran. Secara teori hasil temuan ini konsisten dengan teori *Human Capital*. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan adaptabilitas individu (Suparman and Muzakir, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Triatmanto and Bawono, (2023) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Individu dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik akan memiliki keterampilan yang lebih tinggi, lebih produktif, dan lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja (Triatmanto and Bawono, 2023). Oleh karena itu, pengembangan modal manusia harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan jangka panjang.

Hubungan Inflasi Terhadap Pengangguran

Temuan penelitian ini menunjukkan inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Secara teori, hasil penelitian ini konsisten dengan pandangan Kurva Phillips jangka panjang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suharti, *et.al*, (2021b) dan Guntur *et al.*, (2024) yang menemukan bahwa inflasi tidak secara langsung memengaruhi kenaikan dan penurunan jumlah pengangguran.

Kurva Phillips jangka panjang menunjukkan bahwa tidak ada trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa tingkat pengangguran akan cenderung kembali ke tingkat alami atau *Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment* (NAIRU) terlepas dari tingkat inflasi yang berlaku (Lavoie, 2025). Friedman, (1968) menekankan bahwa kebijakan moneter yang berfokus pada penurunan pengangguran melalui inflasi hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Dalam kondisi inflasi yang rendah dan stabil, dampaknya terhadap keputusan investasi dan perilaku konsumsi mungkin tidak signifikan untuk memicu perubahan pada permintaan atau penawaran tenaga kerja.

Hubungan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Pengangguran

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif terhadap pengangguran. Temuan ini konsisten dengan pandangan ekonomi neoklasik dan didukung oleh penelitian empiris terdahulu (Pratomo, 2016; Feriyanto, El Aiyubbi and Nurdany, 2020; Siregar, 2020). Peningkatan biaya tenaga kerja bagi perusahaan dapat menyebabkan dampak signifikan, seperti pengurangan permintaan tenaga kerja, penundaan rekrutmen, efisiensi melalui pengurangan karyawan, atau bahkan substitusi tenaga kerja dengan modal. Dampak ini terutama dirasakan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga perlu dipertimbangkan kebijakan yang mendukung UKM dalam menghadapi peningkatan biaya tenaga kerja untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi (Mahendra and Parulian, 2021; Siregar, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh IPM, Inflasi, dan UMK terhadap TPT di Eks Karesidenan Banyumas (2016-2024) menggunakan regresi data panel. Berdasarkan analisis regresi data panel, beberapa poin kunci dapat disimpulkan sebagai berikut: **1)** PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini menunjukkan adanya fenomena "*jobless growth*" atau ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) antara kualifikasi angkatan kerja dan kebutuhan pasar, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. **2)** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik dapat efektif menurunkan tingkat pengangguran. **3)** Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Temuan ini konsisten dengan pandangan Kurva Phillips jangka panjang yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang tidak ada *trade-off* antara inflasi dan pengangguran. **4)** Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan upah minimum dapat meningkatkan biaya tenaga kerja bagi perusahaan, sehingga berpotensi menghambat penciptaan lapangan kerja baru atau bahkan menyebabkan pengurangan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Feriyanto, N., El Aiyubbi, D. and Nurdany, A. (2020) 'The impact of unemployment, minimum wage, and real gross regional domestic product on poverty reduction in provinces of Indonesia', *Asian Economic and Financial Review*, 10(10), p. 1088.
- Friedman, M. (1968) 'The role of monetary policy', *The American economic review*, 58(1), pp. 1–17.
- Guntur, M. *et al.* (2024) 'Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Pada Bulan Februari Periode 2021-2024', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)*, 7(1), pp. 70–75.
- Hasibuan, L.S. (2023) 'Analisis pengaruh ipm, inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap

- pengangguran dan kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), pp. 53–62.
- Hjazeen, H., Seraj, M. and Ozdeser, H. (2021) 'The nexus between the economic growth and unemployment in Jordan', *Future Business Journal*, 7(1), p. 42.
- Lavoie, M. (2025) 'Is there a Phillips curve? Unemployment and inflation', *Intermediate Macroeconomics: Theory, Policy and Competing Perspectives* [Preprint].
- Leasiwal, T.C. *et al.* (2022) 'Examining the effects of economic growth on unemployment in Indonesia', *Journal of Social Science*, 3(5), pp. 972–985.
- Mahendra, A. and Parulian, T. (2021) 'Analysis of the Effect of Exchange Rates, Economic Growth and Minimum Wages on Unemployment with Inflation as a Moderating Variable in Indonesia', *International Journal of Research and Review*, 8(2), pp. 439–445.
- Pham, B.T. and Sala, H. (2022) 'Cross-country connectedness in inflation and unemployment: measurement and macroeconomic consequences', *Empirical economics*, 62(3), pp. 1123–1146.
- Popescu, C.C. and Diaconu, L. (2022) 'Inflation–Unemployment Dilemma. A Cross-Country Analysis', *Scientific Annals of Economics and Business*, 69(3), pp. 377–392.
- Prachowny, M.F.J. (1993) 'Okun's law: theoretical foundations and revised estimates', *The review of Economics and Statistics*, pp. 331–336.
- Pratomo, D.S. (2016) 'How does the minimum wage affect employment statuses of youths?: evidence of Indonesia', *Journal of Economic Studies*, 43(2), pp. 259–274.
- Purwanti, D. (2024) 'Inclusive economic growth and fiscal intervention: could it reduce poverty, inequality, and unemployment in East Java?', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), pp. 148–166.
- Ruchba, S.M. and Hadiyan, F. (2019) 'Analysis on Unemployment and Inflation in Indonesia for The Periode of 1980-2016 using Philipps Curve Approach', *Proceeding UII-ICABE*, pp. 111–122.
- Sanitra, N. (2021) 'Effect of Economic Growth And Human Development Index (IPM) on Unemployment in Indonesia', *Jurnal Ekonomi*, 10(01), pp. 13–16.
- Saragih, R.F., Silalahi, P.R. and Tambunan, K. (2022) 'Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021', *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(2), pp. 71–79.
- Siregar, T.H. (2020) 'Impacts of minimum wages on employment and unemployment in Indonesia', *Journal of the Asia Pacific Economy*, 25(1), pp. 62–78.
- Siregar, T.H. (2022) 'Investigating the effects of minimum wages on employment, unemployment and labour participation in Java: A dynamic spatial panel approach', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(2), pp. 195–227.
- Suharti, S., Naufal, M.D. and Paiman, F.L. (2021a) 'Inflation Effect on Unemployment in Indonesia: A Comparative Studies Between Sharia and Conventional Economic Perspectives', *Jurnal Bisnis Strategi*, 30(2), pp. 127–138. Available at: <https://doi.org/10.14710/jbs.30.2.127-138>.
- Suharti, S., Naufal, M.D. and Paiman, F.L. (2021b) 'Inflation Effect on Unemployment in Indonesia: A Comparative Studies Between Sharia and Conventional Economic Perspectives', *Jurnal Bisnis Strategi*, 30(2), pp. 127–138.
- Suparman, S. and Muzakir, M. (2023) 'Regional inequality, human capital, unemployment, and economic growth in Indonesia: Panel regression approach', *Cogent Economics & Finance*, 11(2), p. 2251803.
- Tjahjanto, H. *et al.* (2023) 'High unemployment, disrupted economic growth and sustainable development goals: Analyzing unemployment reduction', *Economics & Sociology*, 16(1), pp. 106–120.
- Triatmanto, B. and Bawono, S. (2023) 'The interplay of corruption, human capital, and unemployment in Indonesia: Implications for economic development', *Journal of Economic Criminology*, 2, p. 100031.